

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja dan menata kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat yang pada gilirannya akan mewujudkan kesejahteraan penduduk Indonesia. Salah satu sasaran pembangunan nasional adalah menurunkan jumlah penduduk miskin.

Kemiskinan merupakan salah satu penyakit dalam ekonomi, sehingga harus disembuhkan atau paling tidak dikurangi. Permasalahan kemiskinan memang merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dilaksanakan secara terpadu (Muhammad Nasir, dkk, 2008).

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, pendidikan yang ditempuh, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender, kondisi lingkungan dan lain sebagainya.

Kemiskinan seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 tidak hanya dipahami sebagai ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan

perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani hidupnya secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam, dan lingkungan hidup, dan rasa aman dari perlakuan atau ancaman kekerasan.

Masalah kemiskinan sebenarnya telah banyak didiskusikan oleh para pakar dari berbagai sudut pandang, misalnya Sen (1981) melihat kemiskinan dari sudut pandang biologis atau kebutuhan dasar (basic need), Scott (1979) melihatnya dari pendapatan rata-rata per kapita (income per capita), dan Freidman (1979) melihatnya dari segi kesempatan untuk mengaktualisasikan basis kekuatan sosial. (Crescent, 2002).

Mengacu pada strategi nasional penanggulangan kemiskinan, definisi kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, apapun jenis kelaminnya yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkesinambungan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses barang dan jasa, lokasi geografis, gender, dan kondisi lingkungan.

Menurut Mathiassen dalam jurnalnya Muhammad Nasir dkk (2008), mengidentifikasi indikator kemiskinan dari survei pengeluaran rumah tangga, antara lain angka buta huruf, pendidikan tertinggi yang ditamatkan, sektor pekerjaan utama kepala rumah tangga, kepemilikan asset rumah tangga (barang-

barang yang bernilai mahal, kendaraan, alat komunikasi, dll), kondisi perumahan, komposisi demografi (jumlah anggota rumah tangga, angka ketergantungan, umur, dan jenis kelamin kepala rumah tangga, jumlah anak dibawah 15 tahun).

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Daerah Istimewa setingkat provinsi di Indonesia yang merupakan peleburan Negara Kesultanan Yogyakarta dan Negara Kadipaten Paku Alaman. D.I. Yogyakarta terletak di bagian selatan Pulau Jawa, dan berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Samudera Hindia. Daerah Istimewa yang memiliki luas 3.185,80 km² ini terdiri atas satu kotamadya, dan empat kabupaten, yang terbagi lagi menjadi 78 kecamatan, dan 438 desa/kelurahan. Menurut sensus penduduk 2010 memiliki populasi 3.452.390 jiwa dengan proporsi 1.705.404 laki-laki, dan 1.746.986 perempuan, serta memiliki kepadatan penduduk sebesar 1.084 jiwa per km².

Permasalahan kemiskinan di D.I. Yogyakarta juga menjadi perhatian penting. Hal itu karena Jumlah penduduk miskin di D.I. Yogyakarta cenderung menurun pada tahun 2011-2015, sebagaimana yang tertera pada tabel di bawah(Tabel 1.1). Pada periode Maret 2011 jumlah penduduk miskin di D.I. Yogyakarta sebesar 562,70 ribu jiwa, terus berkurang hingga pada Maret 2015 menjadi 550,23 ribu jiwa.

Kemiskinan juga merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian Pemerintahan Kasultanan Yogyakarta. Hal itu karena, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan dan perdesaan pada tingkat nasional selama periode September 2014-Maret 2015,

jumlah penduduk miskin di D.I. Yogyakarta juga mengalami peningkatan baik di daerah perkotaan maupun daerah pedesaan. Jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan bertambah 5,22 ribu jiwa (1,61 persen), sedangkan jumlah penduduk miskin di daerah pedesaan mengalami peningkatan lebih besar yaitu 5,97 persen atau bertambah 12,42 ribu jiwa.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Miskin menurut Tipe Daerah di
Daerah Istimewa Yogyakarta, 2011-2015 (ribuan jiwa)

Tahun	D.I. Yogyakarta			Indonesia		
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
Maret 2011	305,32	257,38	562,70	11 079,57	19 042,86	30 122,43
September 2011	300,94	267,11	568,05	11 009,84	18 999,85	30 009,69
Maret 2012	307,52	260,83	568,35	10 706,23	18 544,85	29 251,08
September 2012	308,49	257,24	565,73	10 569,28	18 142,50	28 711,78
Maret 2013	317,12	235,95	553,07	10 387,96	17 781,27	28 169,22
September 2013	329,65	212,30	541,95	10 684,62	17 922,06	28 606,69
Maret 2014	333,03	211,84	544,87	10 507,20	17 772,81	28 280,01
September 2014	324,43	208,15	532,59	10 356,69	17 371,09	27 727,78
Maret 2015	329,65	220,57	550,23	10 652,64	17 940,15	28 592,79

Sumber : Susenas, Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Miskin menurut Kabupaten/kota di
Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010-2014 (ribuan jiwa)

Tahun	Kabupaten/Kota				
	Kulon progo	Bantul	Gunug kidul	Sleman	Yogyakarta
2010	90,00	146,90	148,70	117,00	37,80
2011	92,76	159,38	157,09	117,32	37,74
2012	92,44	158,78	156,49	116,84	37,55
2013	86,50	156,61	152,38	110,84	35,62
2014	84,67	153,49	148,39	110,44	35,60

Sumber : Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/kota tahun 2010-2014

Pola perkembangan jumlah penduduk miskin pada periode 2010 - 2014 berfluktuatif namun cenderung menurun, sebagaimana yang tertera pada tabel di atas (Tabel 1.2). Kenaikan jumlah penduduk miskin pada tahun 2011 terjadi di Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul, sementara dua kabupaten/kota lainnya mengalami penurunan dibandingkan pada keadaan tahun 2010. Persentase kenaikan jumlah penduduk miskin pada tahun 2011 terhadap tahun 2010 tertinggi terjadi di Kabupaten Bantul yaitu dari 146,90 riibu jiwa pada tahun 2010 menjadi 159,38 jiwa pada tahun 2011. Sementara pada periode September 2012-September 2014 jumlah penduduk miskin kembali mengalami penurunan di semua kabupaten/kota.

Dalam gini ratio dijelaskan bahwa pembangunan atau pertumbuhan ekonomi pada dasarnya terdiri dari dua aspek kehidupan yaitu aspek ekonomi dan aspek sosial. Penelitian ini akan membahas tentang aspek ekonominya. Salah satu indikator dari aspek ekonomi dapat dilihat dari tenaga kerja.

Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja, mereka yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja yaitu mereka yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Tenaga kerja merupakan modal yang sangat dominan dalam menyukseskan program pembangunan. Masalah ketenagakerjaan semakin kompleks seiring bertambahnya jumlah penduduk, yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Kualitas sumber daya manusia yang rendah dapat menyebabkan penduduk miskin. Semakin rendahnya tingkat pengangguran maka kesempatan untuk mendapat

kehidupan lebih baik akan semakin besar, karena dapat meningkatkan pendapatan ekonomi negara.

Berdasarkan asumsi dasar teori human capital, seseorang dapat meningkatkan pendapatannya dengan memiliki pekerjaan atau bekerja. Pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan di iringi dengan niat pekerja maka akan mengakibatkan produktivitas kerja yang lebih baik, oleh sebab itu akan menghasilkan penghasilan yang lebih besar.

Tabel 1.3
Penduduk yang Termasuk Angkatan Kerja, Bekerja dan Pengangguran
Pada bulan Agustus menurut Provinsi di Pulau Jawa
2014– 2015 (ribu orang)

Provinsi	Angkatan Kerja		Bekerja		Pengangguran	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
DKI Jakarta	5 063	5 092	4 634	4 724	429	368
Jawa Barat	21 006	20 586	19 231	18 791	1 775	1 795
Jawa Tengah	17 547	17 299	16 551	16 436	996	863
DIY	2 023	1 971	1 956	1 891	67	80
Jawa Timur	20 150	20 275	19 307	19 368	843	907
Banten	5 338	5 335	4 854	4 826	484	509
Nasional (juta orang)	121,87	122,38	114,63	114,82	7,24	7,56

Sumber : BPS RI

Pada table 1.3 diatas, keadaan ketenagakerjaan di Pulau Jawa pada Agustus 2015 menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja terbanyak di Provinsi Jawa Timur (19.368 orang) diikuti oleh Provinsi Jawa Barat (18.791 orang) dan Jawa Tengah (16.436 orang). Jika dibandingkan dengan Agustus 2014, jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk yang bekerja di Provinsi DKI dan Jawa Timur meningkat, sedangkan empat provinsi lainnya menurun. Jumlah penganggur keadaan Agustus 2015 di DKI Jakarta dan Jawa Tengah berkurang

dibandingkan keadaan Agustus 2014, sedangkan empat provinsi lainnya berkurang.

Penduduk miskin biasanya dikaji dalam unit rumah tangga, bukan dalam unit individu. Dalam tulisan ini kemiskinan juga dianalisis dalam unit rumah tangga. Ada beberapa alasan untuk menganalisis rumah tangga miskin daripada penduduk atau individu miskin. Pertama, kemiskinan pada hakikatnya merupakan cermin keadaan ekonomi rumah tangga. Kedua, apabila ditemukan data-data rumah tangga miskin maka intervensi terhadap rumah tangga akan lebih efektif dibanding intervensi kemiskinan terhadap individu yang cenderung mengarah pada pandangan bahwa orang miskin memiliki karakteristik sebagai penyebab kemiskinannya. Ketiga, data-data tentang rumah tangga miskin lebih mudah untuk dikembangkan daripada data-data individu miskin.

Kemiskinan suatu rumah tangga dapat dikenal dengan mudah melalui kondisi di dalam rumah tangga tersebut. Di perkotaan, kemiskinan dapat dilihat dari rumah penduduk di lingkungan yang buruk, sempit dan padat, dan konstruksi yang kurang memenuhi persyaratan baku. Di pedesaan, luas lantai rumah penduduk miskin mungkin tidak berbeda jauh dengan penduduk tidak miskin, namun konstruksi bangunannya akan berbeda secara mencolok. Hal itu bisa dilihat dari jenis lantai, dinding, dan atap rumah.

Perhitungan kemiskinan pada dasarnya adalah perhitungan rumah tangga miskin. Hal ini dikarenakan unit analisis untuk mengukurnya berdasarkan pada keadaan rumah tangga. Seperti disebutkan pada bagian metode, kemiskinan

diukur berdasarkan pengeluaran rumah tangga dibagi jumlah anggota rumah tangga lalu dibandingkan dengan standar kecukupan atau sering juga disebut garis kemiskinan. Oleh karena itu, angka kemiskinan yang pertama didapat adalah kemiskinan rumah tangga. Dalam suatu rumah tangga yang tergolong miskin akan ditemui anggota keluarga yang semuanya tergolong miskin. Anggota keluarga sebagai individu itulah yang kemudian disebut penduduk miskin.

Berdasarkan latar belakang diatas, jumlah penduduk miskin khususnya rumah tangga di D.I. Yogyakarta masih mengalami peningkatan, untuk itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan rumah tangga sehingga dapat digunakan sebagai acuan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan rumah tangga, dan penulis tertarik melakukan penelitian dengan tema “**Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Rumah Tangga Di Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 1981-2014**”.

1.2 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penelitian hanya mengungkapkan pembatas masalah penelitian, diantaranya:

1. Populasi dan sampel dari penelitian ini adalah di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdaftar di Badan Pusat Statistika Daerah Istimewa Yogyakarta

2. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kemiskinan rumah tangga, sedangkan untuk variabel independen dari penelitian ini adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pendidikan rendah, jumlah penduduk.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar pengaruh besarnya pengeluaran rumah tangga terhadap tingkat kemiskinan rumah tangga di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Seberapa besar pengaruh PDRB terhadap tingkat kemiskinan rumah tangga di Daerah Istimewa Yogyakarta?
3. Seberapa besar pengaruh pendidikan rendah terhadap tingkat kemiskinan rumah tangga di Daerah Istimewa Yogyakarta?
4. Seberapa besar pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan rumah tangga di Daerah Istimewa Yogyakarta?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh besarnya pengaruh pengeluaran rumah tangga terhadap tingkat kemiskinan rumah tangga di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh PDRB terhadap tingkat kemiskinan rumah tangga di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pendidikan rendah terhadap tingkat kemiskinan rumah tangga di Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan rumah tangga di Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, antara lain:

1. Bagi instansi terkait, dapat memberikan informasi yang lebih banyak terutama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kemiskinan rumah tangga konsumsi di Indonesia.
2. Sebagai bahan informasi bagi peneliti selanjutnya yang ada kaitannya dibidang yang sama dimasa yang akan datang.
3. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengadakan penelitian selanjutnya.